

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN
PERJANJIAN PEMBAGIAN MASA JABATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT
NOMOR 631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

AFRA SUSHMITA BATUBARA
2210112130

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing:

**Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H.
Beni Kharisma Arrasuli S.H.I., LL.M.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 03/PK-V/III/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 03/PK-V/III/2026

AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBAGIAN
MASA JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR
631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)

LEGAL CONSEQUENCES OF THE INTERIM REPLACEMENT OF REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS PURSUANT TO A TERM SHARING AGREEMENT
(CASE STUDY OF THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NUMBER
631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)

Disusun Oleh:
Author:

Afra Sushmita Batubara
2210112130

Program Kekhususan (PK): Hukum Tata Negara (PK V)
Concentration Program (CP): Constitutional Law (CP V)

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
3 Juni 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on June 3rd, 2026 and
Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

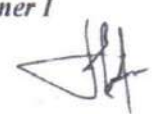
Dekan
Dean


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

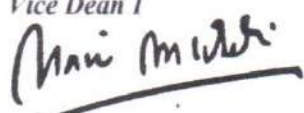
Pembimbing I
Supervisor I


Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 198111302010121005

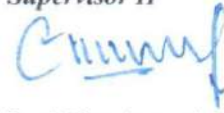
Penguji I
Examiner I


Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.
NIP. 198205092005012002

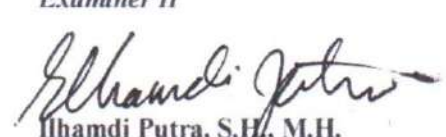
Wakil Dekan I
Vice Dean I


Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing II
Supervisor II


Beni Kharisma A. S.H.I., L.L.M.
NIP. 198303312015041001

Penguji II
Examiner II


Ilhamdi Putra, S.H., M.H.
NIP. 199409162072031008

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Afra Sushmita Batubara	No. Alumni Fakultas:
	a. Tempat/Tgl Lahir : Sigambal/28 Juni 2004 b. Nama Orangtua : Hotman Batubara, Ermita Ritonga c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2210112130	f. Tanggal Lulus : 3 Juni 2026 g. Predikat Lulus : Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3.83 j. Alamat : Jl. S. Parman, Lingkungan Pkn II Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara.	

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBAGIAN MASA JABATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)**

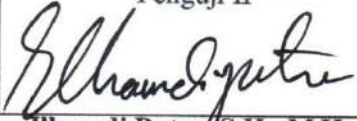
(Afra Sushmita Batubara, 2210112130, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 Hlm + viii, 2026)

ABSTRAK

Sistem demokrasi Indonesia memberikan mandat langsung dari rakyat kepada anggota legislatif. Namun, praktik perjanjian internal partai politik mengenai pembagian masa jabatan anggota dewan memicu ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan benturan antara jaminan masa jabatan 5 (lima) tahun berdasarkan undang-undang dengan hak otonomi partai politik melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW). Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terkait Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan? Kedua, bagaimana akibat hukum Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim lebih mengutamakan prinsip otonomi partai politik (*party autonomy*). Hakim menilai pembagian masa jabatan sebagai kesepakatan internal yang sah dan menghormati putusan Mahkamah Partai, sehingga tindakan partai dianggap sebagai langkah pendisiplinan organisasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedua, akibat hukumnya adalah anggota DPRD yang bersangkutan kehilangan jabatan, hak keuangan, dan fasilitasnya melalui proses PAW. Hal ini membuktikan bahwa keputusan internal partai dapat mengesampingkan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun dalam undang-undang, yang dampaknya dapat menggerus hakikat mandat langsung dari rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik agar syarat pemberhentian kader ditulis secara jelas dan terbatas (limitatif), sehingga pengurus partai tidak bisa memecat anggotanya secara subjektif atau sepihak. Partai politik dan pembentuk undang-undang perlu menetapkan "Rasio Kontribusi Suara" sebesar 50%+1 untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi kader dengan basis massa riil agar tidak diberhentikan secara sepihak. Selain itu, KPU bersama Mahkamah Partai perlu melakukan audit suara setelah pemilu untuk menentukan kursi mana yang boleh dibagi masa jabatannya dan mana yang tidak, demi melindungi suara pemilih dan menjaga keadilan.

Kata Kunci: Penggantian Antarwaktu (PAW), Pembagian Masa Jabatan, Otonomi Partai Politik, Rasio Kontribusi Suara, Aturan Limitatif.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 3 Juni 2026.
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Afra Sushmita Batubara	Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number:	Student Name:	Alumni Faculty Number:
	Afra Sushmita Batubara		
a. Place/Date of Birth : Sigambal/ 28 th June 2004		f. Graduation Date : 3 rd June 2026	
b. Parents' Name : Hotman Batubara, Ernita Ritonga		g. Pass Predicate : Cumlaude	
c. Faculty : Law		h. Length of Study : 3 Years 10 Month	
d. Concentration : Constitutional Law		i. GPA : 3.83	
e. Student ID : 2210112130		j. Address : Jl. S. Parman, Lingkungan Pkn II Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara.	

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE INTERIM REPLACEMENT OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS PURSUANT TO A TERM-SHARING AGREEMENT
(CASE STUDY OF THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)**

(Afra Sushmita Batubara, 2210112130, Faculty of Law, Andalas University, 90 Pages + viii, 2026)

ABSTRACT

The Indonesian democratic system provides a direct mandate from the people to legislative members. However, the practice of internal political party agreements regarding the division of legislative terms of office triggers legal uncertainty. This creates a conflict between the legally guaranteed 5 (five) year term of office and the political party's right to autonomy through the recall mechanism. This study addresses two main issues: First, how judges consider the PAW of Regional House of Representatives (DPRD) members based on term-sharing agreements? Second, what are the legal consequences of the PAW of DPRD members based on term-sharing agreements? This study employs a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate two main findings. First, judges' considerations prioritize the principle of political party autonomy. Judges view the term-sharing agreement as a valid internal covenant and respect the decision of the Party Court; thus, the party's action is considered an organizational disciplinary measure rather than an Unlawful Act (*Perbuatan Melawan Hukum* or *PMH*). Second, the legal consequence is that the respective DPRD members lose their position, financial rights, and facilities through the PAW process. This proves that internal party decisions can override the 5 (five)-year term provision in the law, which ultimately erodes the essence of the direct mandate from the people. Therefore, amendments are necessary for Article 16 paragraph (1) letter d of the Political Party Law so that the criteria for dismissing party cadres are formulated clearly and limitedly (*limitative*), preventing party officials from dismissing members subjectively or unilaterally. Political parties and lawmakers need to establish a "Vote Contribution Ratio" of 50%+1 to provide constitutional protection for cadres with a real grassroots voter base against unilateral dismissal. Furthermore, the General Elections Commission (KPU) along with the Party Court must conduct post-election vote audits to determine which seats may or may not be subject to term-sharing, in order to protect voters' rights and maintain justice.

Keywords: *Interim Replacement (PAW), Term-Sharing Agreement, Political Party Autonomy, Vote Contribution Ratio, Limitative Rules.*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at June 3rd, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Afra Sushmita Batubara	Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Arfiani, S.H., M.H.



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: